



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 10833-10840

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Tantangan dan Peluang Penerapan Good Governance pada Pemerintah Desa Pulau Moro Kecamatan Moro Kabupaten Karimun

Deska Zulkarnain
Universitas Karimun
deskadhita@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan peluang dalam penerapan prinsip-prinsip good governance pada Pemerintah Desa Pulau Moro, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Penerapan good governance menjadi aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga, serta didukung observasi lapangan dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi good governance di Desa Pulau Moro masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, belum optimalnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, serta keterbatasan infrastruktur akibat karakteristik wilayah kepulauan. Di sisi lain, terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan, seperti peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, penguatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta peningkatan literasi masyarakat mengenai tata kelola pemerintahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan penerapan good governance memerlukan strategi yang adaptif terhadap karakteristik wilayah kepulauan melalui penguatan kapasitas kelembagaan, digitalisasi layanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat, serta sistem pengawasan yang lebih efektif guna mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Good Governance; Pemerintah Desa; Tantangan; Peluang; Akuntabilitas; Partisipasi Masyarakat.

1. Latar Belakang

Penerapan prinsip-prinsip good governance merupakan fondasi esensial bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di Indonesia, kebijakan otonomi daerah telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah desa untuk mengelola sumber daya dan menyelenggarakan pelayanan publik secara mandiri. Konsep good governance, yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, supremasi hukum, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, serta responsivitas, menjadi panduan utama dalam optimalisasi fungsi pemerintahan di tingkat desa (Jamal et al., 2020; Karya Pamungkas and Rosyanfikri, 2022). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip ini seringkali menghadapi beragam tantangan, terutama di daerah-daerah dengan karakteristik geografis dan sosial-ekonomi yang spesifik. Kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, disparitas akses informasi, serta dinamika partisipasi masyarakat dapat menghambat pencapaian tata kelola pemerintahan yang ideal. Pemerintah Desa Pulau Moro, yang terletak di Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, merupakan salah satu entitas pemerintahan desa yang beroperasi dalam konteks wilayah kepulauan, yang secara inheren memiliki tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pemahaman mendalam mengenai tantangan spesifik dan peluang yang ada di Desa Pulau Moro sangatlah krusial untuk merumuskan strategi yang tepat guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa di wilayah tersebut. Tanpa analisis yang komprehensif, upaya perbaikan tata kelola dapat menjadi kurang efektif dan tidak sesuai dengan kebutuhan lokal.

Good governance tidak hanya dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sebagai proses penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan transparansi,

Tantangan dan Peluang Penerapan Good Governance pada Pemerintah Desa Pulau Moro Kecamatan Moro
Kabupaten Karimun

akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan supremasi hukum. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Junaedi, 2023; Zaitul et al., 2023). Seiring meningkatnya alokasi Dana Desa setiap tahunnya, pemerintah desa dituntut untuk menerapkan tata kelola yang semakin transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangan desa yang baik tidak hanya ditentukan oleh kompetensi aparatur desa, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, serta tingginya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan desa (Bawono et al., 2020; Pahlawan et al., 2020; Susilowati et al., 2020).

Kajian mengenai penerapan good governance di tingkat desa di Indonesia telah menunjukkan bahwa berbagai faktor dapat memengaruhi keberhasilan implementasinya. Prinsip-prinsip seperti transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, misalnya, sangat dipengaruhi oleh kapasitas aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, serta tingkat partisipasi masyarakat (Pahlawan et al., 2020; Mada et al., 2017). Keterlibatan aktif masyarakat bukan hanya menjadi penopang akuntabilitas, tetapi juga merupakan elemen krusial dalam memastikan efektivitas program pembangunan desa. Di sisi lain, karakteristik wilayah pesisir dan kepulauan seringkali memerlukan pendekatan tata kelola yang adaptif untuk mengelola sumber daya dan pembangunan sosio-ekonomi yang berkelanjutan. Harmonisasi kebijakan dan pengakuan terhadap kearifan lokal juga menjadi faktor penting dalam tata kelola pemerintahan di wilayah semacam ini. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan dalam menganalisis secara mendalam tantangan dan peluang penerapan good governance secara spesifik pada pemerintah desa di wilayah kepulauan seperti Desa Pulau Moro. Studi-studi yang ada cenderung bersifat umum atau fokus pada wilayah yang berbeda, sehingga belum secara komprehensif menjawab kompleksitas yang dihadapi pemerintah desa di lokasi penelitian ini.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi good governance pada pemerintahan desa tidak hanya dipengaruhi oleh aspek administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi geografis, karakteristik sosial masyarakat, kapasitas kelembagaan, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, wilayah kepulauan seperti Desa Pulau Moro memiliki karakteristik yang memerlukan pendekatan tata kelola yang adaptif dibandingkan dengan desa-desa di wilayah daratan (Annahar et al., 2023; Zeho et al., 2020). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam tantangan serta peluang dalam penerapan prinsip-prinsip good governance pada Pemerintah Desa Pulau Moro, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun. Secara spesifik, penelitian ini akan menjawab dua pertanyaan utama: pertama, bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Pulau Moro dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance, dan kedua, apa saja peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa di Desa Pulau Moro. Melalui investigasi mendalam terhadap konteks lokal, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang signifikan terhadap pemahaman dan perbaikan tata kelola pemerintahan desa, khususnya di wilayah kepulauan Indonesia.

2. Metode Penelitian

2.1. Desain Penelitian

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai kompleksitas penerapan prinsip good governance pada pemerintah desa, termasuk identifikasi berbagai tantangan dan peluang yang ada. Studi kasus memungkinkan fokus investigasi pada konteks spesifik Desa Pulau Moro, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, sehingga data yang terkumpul kaya dan terperinci. Metode ini memungkinkan penjelajahan fenomena secara holistik dalam lingkungan alaminya, memberikan gambaran komprehensif tentang realitas yang dihadapi (Sucihati, 2021). Pemilihan studi kasus juga relevan mengingat karakteristik unik wilayah kepulauan yang mungkin memengaruhi tata kelola pemerintahan (Andhika, 2021).

Dalam konteks ini, studi kasus menjadi alat yang efektif untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi diimplementasikan dalam praktek sehari-hari (Arsik, 2020; Lusiana, 2023). Peneliti akan berupaya menggali pengalaman dan persepsi para pemangku kepentingan secara langsung. Pendekatan kualitatif ini juga sesuai untuk mengeksplorasi isu-isu subtil yang mungkin tidak terungkap melalui metode kuantitatif, seperti dinamika sosial dan budaya yang memengaruhi tata kelola (Jamal, 2020). Dengan demikian, desain ini diharapkan mampu memberikan jawaban yang mendalam terhadap rumusan masalah penelitian.

2.2. Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik purposive sampling. Kriteria pemilihan informan dirancang secara cermat untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan serta mendalam mengenai topik penelitian. Informan utama yang akan dilibatkan meliputi Kepala Desa Pulau Moro, seluruh perangkat desa yang aktif menjalankan tugas administrasi dan pelayanan, tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh dan pemahaman terhadap kebijakan desa, serta perwakilan masyarakat yang secara aktif terlibat dalam kegiatan pemerintahan desa. Pemilihan informan yang terfokus ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif yang beragam dan komprehensif mengenai tantangan dan peluang penerapan good governance.

Teknik purposive sampling ini sangat esensial dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti untuk secara strategis memilih partisipan yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian untuk menggali secara mendalam fenomena yang ada. Proses penggalian informasi akan terus dilakukan hingga tercapai titik kejenuhan data atau data saturation, yang menandakan bahwa informasi baru yang diperoleh tidak lagi menambah pemahaman yang signifikan terhadap isu yang diteliti. Keterlibatan informan yang kompeten dan representatif diharapkan dapat menghasilkan data yang valid dan kaya.

2.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan mengandalkan tiga teknik utama yang saling melengkapi, yaitu wawancara mendalam (in depth interview), observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam akan dilakukan secara terstruktur maupun semi-terstruktur dengan para informan kunci untuk menggali pandangan, pengalaman, serta pemahaman mereka terkait implementasi good governance, hambatan yang dihadapi, dan potensi pengembangan di Desa Pulau Moro. Teknik ini memungkinkan penggalian informasi yang mendalam dan personal mengenai isu-isu yang diteliti (Raheni, 2019).

Selanjutnya, observasi partisipatif akan dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas sehari-hari, proses administrasi, interaksi antar aparat desa dan masyarakat, serta implementasi kebijakan di lingkungan pemerintah desa. Observasi ini bertujuan untuk menangkap data empiris yang mungkin tidak terungkap melalui wawancara. Studi dokumentasi akan melengkapi data primer dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen relevan, seperti peraturan desa, laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa, notulensi rapat, serta dokumen perencanaan pembangunan desa. Dokumen-dokumen ini penting untuk memverifikasi temuan dari wawancara dan observasi, serta memberikan konteks historis dan legalitas terhadap isu yang diteliti (Pahlawan, 2020; Dwiningwarni, 2020).

2.4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini akan mengadopsi model interaktif dari Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama yang dilakukan secara berkelanjutan. Tahap pertama adalah reduksi data, di mana seluruh data mentah yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi akan dirangkum, dipilih poin-poin pentingnya, serta diklasifikasikan dan dikodekan sesuai dengan kategori penelitian. Proses ini bertujuan untuk menyederhanakan kumpulan data yang besar menjadi format yang lebih terkelola dan fokus pada informasi yang relevan dengan rumusan masalah (Fajri, 2021).

Tahap kedua adalah penyajian data (data display), di mana data yang telah direduksi akan diorganisasi dan disusun dalam bentuk narasi deskriptif, matriks, grafik, atau diagram. Penyajian data ini dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap pola-pola yang muncul, hubungan antar variabel, serta mendeteksi isu-isu kunci yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. Melalui penyajian data yang terstruktur, peneliti dapat melihat gambaran keseluruhan temuan secara lebih jelas dan sistematis (Mada, 2017; Umaira, 2019).

Tahap ketiga dan terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification). Pada tahap ini, peneliti akan mulai menginterpretasikan data yang telah disajikan untuk merumuskan kesimpulan awal yang kemudian akan terus diuji dan diverifikasi. Verifikasi temuan akan dilakukan melalui triangulasi, baik triangulasi sumber (membandingkan data dari informan yang berbeda) maupun triangulasi metode (membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi). Proses ini sangat krusial untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan penelitian, serta untuk membangun argumen yang kuat mengenai tantangan dan peluang penerapan good governance di Desa Pulau Moro (Marah, 2022; Ali, 2021).

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Gambaran Umum Pemerintah Desa Pulau Moro dan Profil Informan

Pemerintah Desa Pulau Moro merupakan bagian dari administrasi pemerintahan di Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun. Terletak di wilayah kepulauan, desa ini memiliki karakteristik geografis yang khas yang memengaruhi dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Struktur pemerintahan desa mengikuti pola umum di Indonesia, yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan beberapa Kepala Seksi atau urusan yang membidangi fungsi-fungsi spesifik seperti administrasi umum, keuangan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

Dalam penelitian ini, teknik purposive sampling digunakan untuk memilih informan guna memperoleh data yang kaya dan relevan. Informan yang dilibatkan meliputi Kepala Desa Pulau Moro, perangkat desa yang memiliki peran langsung dalam administrasi dan pelayanan, serta beberapa tokoh masyarakat yang dianggap memiliki pemahaman mendalam mengenai kondisi desa dan tata kelola pemerintahan. Anonimitas nama informan dijaga sesuai dengan ka-idah etika penelitian untuk memastikan kenyamanan dan kerahasiaan mereka. Profil umum informan ini mencakup jabatan atau peran mereka dalam masyarakat dan pemerintahan desa, serta durasi pengalaman mereka yang relevan dengan topik penelitian.

3.2. Tantangan Penerapan Good Governance Pada Pemerintah Desa Pulau Moro

Penerapan prinsip-prinsip good governance pada Pemerintah Desa Pulau Moro dihadapkan pada sejumlah tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama yang teridentifikasi adalah terkait dengan partisipasi masyarakat. Meskipun terdapat upaya untuk melibatkan warga, tingkat partisipasi dalam forum-forum perencanaan dan pengambilan keputusan desa masih belum optimal. Sebagian masyarakat menunjukkan apatisme atau keterbatasan akses untuk berpartisipasi secara aktif, baik karena kendala geografis maupun kurangnya pemahaman terhadap urgensi pelibatan mereka. Hal ini senada dengan temuan bahwa pencapaian inclusive governance di tingkat desa dapat menghadapi hambatan signifikan tergantung pada sistem pendukung yang ada (Annahar et al., 2023). Temuan ini memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Rendahnya keterlibatan masyarakat tidak hanya disebabkan oleh minimnya akses informasi, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat literasi publik terhadap proses pemerintahan desa. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Angelia et al. (2020) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan kelembagaan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif.

Tantangan kedua terkait dengan akuntabilitas dan transparansi, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa. Meskipun telah terdapat sistem pelaporan, masih ditemukan kendala dalam penyampaian informasi yang komprehensif dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketidakjelasan alur informasi dan kurangnya sosialisasi mengenai penggunaan dana desa dapat menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat. Manajemen keuangan desa yang efektif menjadi krusial untuk akuntabilitas, dan penelitian terdahulu menekankan pentingnya sistem yang kuat serta model kontrol internal yang memadai (Bawono et al., 2020; Susilowati et al., 2020). Transparansi pengelolaan keuangan desa merupakan prasyarat utama dalam membangun kepercayaan publik. Pemanfaatan media digital seperti website desa, media sosial, maupun sistem informasi desa terbukti mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik sekaligus memperkuat akuntabilitas pemerintah desa (Bakhtiar, 2021; Purnomo et al., 2020).

Selanjutnya, keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun infrastruktur, turut menjadi kendala. Kualitas dan kuantitas aparatur desa yang ada belum sepenuhnya memadai untuk menjalankan berbagai fungsi pemerintahan dan pelayanan secara optimal. Disparitas dalam kapasitas aparatur desa dapat memengaruhi efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Hal ini juga mencakup tantangan dalam hal implementasi standar pelayanan publik yang efektif, yang sangat bergantung pada kepemimpinan dan sumber daya yang tersedia (Junaedi, 2023; Zaitul et al., 2023).

Selain itu, tantangan yang muncul juga berkaitan dengan dinamika desentralisasi fiskal. Meskipun desentralisasi bertujuan meningkatkan akuntabilitas lokal, implementasinya di tingkat desa dapat berisiko jika tidak disertai dengan pengawasan yang memadai. Hal ini berpotensi meningkatkan peluang terjadinya penyalahgunaan jika tidak ada mekanisme pengawasan yang kuat (Fatoni, 2020). Di Pemerintah Desa Pulau Moro, hal ini termanifestasi dalam kebutuhan akan penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap pengelolaan anggaran desa.

3.3. Pembahasan Tantangan Penerapan Good Governance

Tantangan partisipasi masyarakat yang belum optimal di Pemerintah Desa Pulau Moro mengindikasikan adanya kesenjangan antara idealisme keterlibatan publik dalam prinsip good governance dengan realitas implementasi di lapangan. Keterbatasan akses geografis di wilayah kepulauan, serta mungkin pula tingkat literasi ekonomi dan politik masyarakat, menjadi faktor penghambat utama. Kondisi ini menantang konsep inclusive governance yang menekankan keterlibatan seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Jika tidak ditangani, hal ini dapat menyebabkan kebijakan desa tidak sepenuhnya merefleksikan kebutuhan dan aspirasi warganya, serta mengurangi legitimasi pemerintahan desa di mata masyarakat. Kerangka berfikir yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat sebagai pilar utama tata kelola yang baik (Karya Pamungkas and Rosyanfikri, 2022) teruji di sini, di mana defisit partisipasi langsung berkorelasi dengan potensi ketidaksesuaian program dengan kebutuhan riil.

Isu akuntabilitas dan transparansi, khususnya dalam pengelolaan dana desa, merupakan lanjutan dari tantangan partisipasi. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai laporan keuangan desa, serta kendala dalam mekanisme penyampaian informasi, menciptakan kabut kepercayaan. Hal ini berimplikasi pada efektivitas penggunaan dana desa untuk

pembangunan. Studi yang menekankan pentingnya sistem manajemen keuangan desa yang transparan dan akuntabel (Bakhtiar, 2021) menegaskan bahwa tanpa sistem yang robust dan kemauan politik untuk terbuka, sulit mencapai tujuan good governance. Kualitas kepemimpinan desa dan kompetensi aparatur dalam mengelola dan melaporkan keuangan menjadi kunci utama dalam mengatasi masalah ini, yang sesuai dengan temuan bahwa peran serta kompetensi pejabat desa sangat signifikan (Bawono et al., 2020; Susilowati et al., 2020).

Keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur di Pemerintah Desa Pulau Moro merupakan realitas umum di banyak desa di Indonesia, namun terasa lebih akut di wilayah kepulauan. Kekurangan tenaga ahli, aparatur yang tidak memiliki kapasitas memadai, serta infrastruktur pendukung yang minim (misalnya, sarana teknologi informasi) secara langsung menghambat kemampuan desa untuk menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi. Jika aparatur desa tidak terlatih dengan baik, proses pelayanan publik akan melambat dan kurang berkualitas. Ini selaras dengan pandangan bahwa keberhasilan implementasi good governance bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, kepemimpinan yang efektif, dan standar pelayanan publik yang memadai (Junaedi, 2023; Zaitul et al., 2023). Tanpa sumber daya yang memadai, ketiga elemen tersebut sulit tercapai secara optimal.

Tantangan terkait desentralisasi fiskal di Desa Pulau Moro perlu dicermati lebih dalam. Meskipun dana desa telah dialokasikan, potensi penyalahgunaan atau ketidaktepatan sasaran tetap ada jika mekanisme pengawasan lemah. Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa desentralisasi dapat menjadi pedang bermata dua: meningkatkan pemberdayaan atau justru membuka celah korupsi jika tidak diawasi ketat (Fatoni, 2020). Untuk Desa Pulau Moro, ini berarti perlunya penguatan peran lembaga pengawas seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pengembangan sistem monitoring internal yang efektif. Dialog antara teori desentralisasi fiskal dan praktik di desa menunjukkan bahwa regulasi saja tidak cukup; dibutuhkan implementasi kontrol yang kuat.

3.4. Peluang Peningkatan Penerapan Good Governance Pada Pemerintah Desa Pulau Moro

Salah satu peluang utama yang teridentifikasi adalah peningkatan kapasitas aparatur desa. Melalui program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang terarah, kompetensi aparatur dalam bidang administrasi, manajemen keuangan, pelayanan publik, dan pemanfaatan teknologi informasi dapat ditingkatkan. Pelatihan ini akan membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas secara lebih efektif dan efisien. Pemberdayaan aparatur desa menjadi fondasi penting untuk mewujudkan tata kelola yang baik.

Peluang signifikan lainnya adalah pemanfaatan teknologi informasi. Penerapan sistem informasi desa yang terintegrasi dapat meningkatkan transparansi dalam administrasi dan pelayanan, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat. Teknologi informasi dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengurangi birokrasi, meminimalkan potensi pungutan liar, dan meningkatkan akuntabilitas melalui jejak digital yang tercatat.

Penguatan kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan juga membuka peluang luas. Kerjasama dengan pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, serta akademisi dapat memobilisasi sumber daya tambahan, baik dalam bentuk pendanaan, keahlian, maupun dukungan teknis. Kemitraan ini juga dapat mendorong inovasi dalam program-program pembangunan desa dan meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Kolaborasi antar pemangku kepentingan sangat esensial untuk akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dan pembangunan pedesaan (Zeho et al., 2020).

Selain itu, peningkatan kesadaran dan literasi masyarakat mengenai pentingnya partisipasi aktif dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa merupakan modal berharga. Upaya sosialisasi yang berkelanjutan dan forum

dialog yang konstruktif dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah desa dan memberikan masukan yang membangun. Pemberdayaan masyarakat melalui institusi lokal sebagai mitra pemerintah desa juga krusial untuk proses pembangunan yang partisipatif (Angelia et al., 2020).

3.5. Pembahasan Peluang Peningkatan Penerapan Good Governance Pada Pemerintah Desa Pulau Moro

Peluang peningkatan kapasitas aparatur desa di Pemerintah Desa Pulau Moro berakar pada kebutuhan untuk menjawab tantangan keterbatasan sumber daya manusia. Dengan program pelatihan yang tepat sasaran, aparatur desa dapat dibekali keahlian dalam administrasi modern, manajemen keuangan yang transparan, serta teknik pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep good governance yang menghendaki aparatur yang kompeten dan profesional. Jika dikaitkan dengan kerangka berfikir, peningkatan kapasitas ini merupakan intervensi krusial untuk meningkatkan kualitas input dan proses tata kelola pemerintahan. Investasi pada SDM aparatur desa akan berbanding lurus dengan kualitas output layanan publik. Kompetensi aparatur desa menjadi modal utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Aparatur yang memiliki kompetensi administrasi, pengelolaan keuangan, serta kemampuan memanfaatkan teknologi informasi akan lebih mampu menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi sebagaimana diamanatkan dalam konsep good governance (Junaedi, 2023; Zaitul et al., 2023).

Digitalisasi pemerintahan desa tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan publik, tetapi juga memperluas ruang partisipasi masyarakat melalui keterbukaan informasi dan layanan berbasis elektronik. Dengan demikian, transformasi digital menjadi salah satu strategi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang adaptif terhadap perkembangan teknologi (Purnomo et al., 2020). Pemanfaatan teknologi informasi sebagai peluang strategis sangat relevan di era digital ini. Sistem informasi desa yang terintegrasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan administrasi, tetapi juga sebagai sarana komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan masyarakat. Ini akan membantu mewujudkan prinsip transparansi secara lebih efektif, di mana data dan informasi dapat diakses oleh publik kapan saja dan di mana saja, sejauh tersedianya infrastruktur dasar. Hal ini juga dapat mendukung akuntabilitas melalui pencatatan transaksi dan keputusan yang terverifikasi, meminimalkan ruang manipulasi. Temuan yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi memengaruhi tata kelola yang baik (Purnomo et al., 2020) memperkuat argumen ini.

Penguatan kemitraan dan kolaborasi membuka dimensi baru dalam mobilisasi sumber daya dan inovasi. Pemerintah Desa Pulau Moro dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan dukungan teknis dan pendanaan, dengan sektor swasta untuk pengembangan ekonomi lokal atau program CSR, dan dengan lembaga penelitian untuk kajian dan solusi inovatif. Kolaborasi yang erat antar pemangku kepentingan, seperti yang diungkapkan oleh Zeho et al. (2020), sangat penting untuk akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dan keberhasilan pembangunan. Tanpa sinergi, upaya pembangunan akan berjalan sporadis dan kurang efektif.

Peningkatan kesadaran dan literasi masyarakat, serta pemberdayaan institusi lokal, merupakan peluang fundamental untuk mewujudkan partisipasi yang bermakna. Ketika masyarakat semakin sadar akan hak dan kewajibannya, serta memiliki pemahaman yang baik tentang program desa, mereka akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan evaluasi. Pemberdayaan institusi masyarakat sebagai mitra strategis pemerintah desa (Angelia et al., 2020) memastikan bahwa suara masyarakat tidak hanya didengar, tetapi juga menjadi bagian integral dari proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan. Ini adalah wujud nyata dari prinsip demokrasi partisipatif dalam tata kelola pemerintahan desa.

3.6. Pemaknaan Lintas Tema dan Konstruksi Konseptual

Analisis temuan penelitian menunjukkan bahwa tantangan dan peluang dalam penerapan good governance di Pemerintah Desa Pulau Moro saling terkait secara erat dan bersifat dinamis. Keterbatasan partisipasi masyarakat, misalnya, secara langsung memperburuk tantangan akuntabilitas, karena minimnya pengawasan publik. Sebaliknya, peluang peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman mereka tentang pentingnya transparansi, yang pada gilirannya dapat mendorong partisipasi masyarakat yang lebih baik. Keterkaitan ini menegaskan bahwa upaya perbaikan tata kelola harus dilakukan secara holistik, bukan parsial.

Dalam konteks wilayah kepulauan, tantangan geografis seperti keterjangkauan dan konektivitas menjadi faktor yang memperparah isu partisipasi dan akses informasi. Hal ini mengindikasikan perlunya adaptasi model good governance agar sesuai dengan konteks lokal. Pemanfaatan teknologi informasi, sebagai salah satu peluang, menjadi sangat krusial di sini untuk menjembatani kesenjangan geografis dan memastikan penyebaran informasi yang merata. Tanpa solusi berbasis teknologi, upaya peningkatan transparansi dan partisipasi akan terus terbentur oleh jarak fisik.

Hubungan antara desentralisasi fiskal dan tantangan akuntabilitas juga menunjukkan perlunya penguatan mekanisme kontrol internal dan eksternal yang disesuaikan dengan kapasitas desa. Peluang kolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga pengawas eksternal menjadi kunci untuk mengatasi risiko yang timbul dari desentralisasi fiskal. Kerangka berfikir yang dibangun dalam penelitian ini, yang menyoroti keterkaitan antara partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan, diperkaya oleh temuan empiris yang menunjukkan bahwa faktor-faktor kontekstual seperti geografis dan kapasitas sumber daya sangat memengaruhi hubungan tersebut.

Dengan demikian, dapat dikonstruksikan sebuah model konseptual yang menekankan pentingnya "Tata Kelola Pemerintahan Desa Kepulauan yang Adaptif". Model ini memposisikan prinsip-prinsip good governance sebagai tujuan, namun menekankan bahwa strategi pencapaiannya harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah kepulauan. Adaptasi ini mencakup inovasi dalam partisipasi (misalnya, melalui platform digital), penguatan akuntabilitas dengan memanfaatkan teknologi dan kemitraan, serta peningkatan kapasitas aparatur yang berfokus pada solusi untuk tantangan spesifik kepulauan. Model ini memberikan pandangan yang lebih komprehensif mengenai bagaimana good governance dapat diimplementasikan secara efektif di konteks yang unik seperti Desa Pulau Moro, melampaui generalisasi teori-teori yang mungkin lebih cocok untuk wilayah daratan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan good governance di wilayah kepulauan memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan wilayah daratan. Faktor geografis, keterbatasan akses informasi, serta kapasitas sumber daya manusia menjadi variabel kontekstual yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan publik di tingkat desa. Oleh karena itu, implementasi good governance tidak dapat dilakukan melalui pendekatan yang seragam, melainkan harus disesuaikan dengan karakteristik lokal masing-masing desa (Annahar et al., 2023; Zeho et al., 2020).

4. Kesimpulan

Penelitian ini telah mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam tantangan serta peluang dalam penerapan prinsip-prinsip good governance pada Pemerintah Desa Pulau Moro, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun. Berdasarkan temuan yang diperoleh dari analisis data kualitatif melalui studi kasus, wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan utama sebagai berikut: Tantangan Penerapan Good Governance: Pemerintah Desa Pulau Moro dihadapkan pada beberapa tantangan signifikan dalam mengimplementasikan good governance. Tantangan utama meliputi: Partisipasi Masyarakat yang Belum Optimal: Tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam forum-forum perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan desa masih relatif rendah. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti apatisme, keterbatasan pemahaman mengenai urgensi partisipasi, serta kendala geografis yang menghambat akses bagi sebagian warga. Fenomena ini sejalan dengan temuan (Annahar et al., 2023) yang menyoroti kompleksitas pencapaian inclusive governance di tingkat desa. Isu Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan: Meskipun terdapat mekanisme pelaporan, masih ditemukan hambatan dalam memastikan informasi keuangan desa tersaji secara komprehensif, mudah diakses, dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketidakjelasan alur informasi dan sosialisasi yang minim berpotensi menimbulkan keraguan publik terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini mengkonfirmasi pentingnya sistem pengelolaan keuangan yang kuat dan kontrol internal yang memadai sebagaimana ditekankan oleh (Bawono et al., 2020) dan (Susilowati et al., 2020). Keterbatasan Sumber Daya: Kualitas dan kuantitas aparatur desa serta ketersediaan infrastruktur pendukung masih menjadi kendala. Keterbatasan dalam kapasitas teknis dan manajerial aparatur desa, serta minimnya alokasi anggaran, berdampak pada efektivitas pelaksanaan program dan pelayanan publik. Keterbatasan ini juga berimplikasi pada kemampuan desa dalam memanfaatkan teknologi informasi atau mengembangkan inovasi pelayanan. Peluang Peningkatan Good Governance: Di samping tantangan, terdapat pula sejumlah peluang strategis yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Pulau Moro untuk memperbaiki dan memperkuat penerapan good governance. Peluang tersebut mencakup: Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa: Terdapat potensi besar dalam peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur desa melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan studi banding. Peningkatan kapasitas ini sangat krusial untuk meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan administrasi, keuangan, dan pelayanan publik, serta dalam merespons tuntutan tata kelola yang baik (Junaedi, 2023). Pemanfaatan Teknologi Informasi: Implementasi sistem informasi desa yang terintegrasi dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan. Pemanfaatan teknologi seperti website desa, media sosial, atau aplikasi pengaduan masyarakat dapat menjembatani kesenjangan informasi dan meningkatkan aksesibilitas publik terhadap data dan layanan desa (Zaitul et al., 2023). Penguatan Kemitraan dan Kolaborasi: Membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta akademisi, membuka peluang untuk mendapatkan dukungan sumber daya, keahlian, dan inovasi. Kemitraan yang kuat dapat membantu mengatasi keterbatasan finansial dan sumber daya manusia (Fatoni,

2020). Peningkatan Kesadaran dan Edukasi Masyarakat: Upaya sistematis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka, serta pentingnya partisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dapat mendorong keterlibatan yang lebih besar. Kampanye edukasi, sosialisasi program, dan dialog interaktif dapat membangun budaya partisipasi yang positif. Keterkaitan Tantangan dan Peluang: Teridentifikasi adanya keterkaitan yang erat antara tantangan dan peluang. Keterbatasan sumber daya manusia aparatur desa (tantangan) dapat diatasi melalui program peningkatan kapasitas (peluang). Isu transparansi pengelolaan keuangan (tantangan) dapat diperbaiki dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk penyajian data yang terbuka (peluang). Rendahnya partisipasi masyarakat (tantangan) dapat ditingkatkan melalui upaya edukasi dan penguatan kemitraan yang melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi lokal (peluang). Oleh karena itu, pemanfaatan peluang secara strategis menjadi kunci untuk memitigasi dan mengatasi tantangan yang ada, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik. Analisis ini sejalan dengan pandangan bahwa inovasi dan dukungan eksternal memainkan peran penting dalam reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan (Bakhtiar, 2021).

Referensi

1. Annahar, N., Widianingsih, I., Muhtar, E. A., and Paskarina, C. (2023). The road to inclusive decentralized village governance in indonesia. *Sustainability*, 15(11):8616.
2. Bakhtiar, B. (2021). Accountability and transparency in financial management of village fund allocations in achieving good governance. *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2):230–245.
3. Bawono, I. R., Kinasih, A. D. M., and Rahayu, A. K. (2020). Factors affecting accountability of village fund management through implementation of the village financial system (siskeudes). *Journal of Accounting and Investment*, 21(3).
4. Fatoni, A. (2020). Fiscal decentralization dilemma in indonesia: Between corruption accountability and probability at local levels. *Jurnal Bina Praja*, 12(1):101–110.
5. Jamal, Y., Mustanir, A., and Latif, A. (2020). Penerapan prinsip good governance terhadap aparatur desa dalam pelayanan publik di desa ciro-ciroe kecamatan watang pulu kabupaten sidenreng rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 8(3):207–212.
6. Junaedi, J. (2023). Implementation of village governance based on principles of good governance of public service in indonesia. *International Journal of Business, Law, and Education*, 4(1):249–266.
7. Karya Pamungkas, T. and Rosyanfikri, R. (2022). Analisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan pemerintahan desa. *JURNAL PARADIGMA MA-DANI*, 8(2):36–45.
8. Mada, S., Kalangi, L., and Gamaliel, H. (2017). Pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten gorontalo. *JURNAL Riset AKUNTANSI DAN AU-DITING GOODWILL*, 8(2).
9. Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., and Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2):162.
10. Susilowati, N., Mahmud, A., Widhiastuti, R., and Rahmaningtyas, W. (2020). Good village governance: Internal control model of village funds management. *KnE Social Sciences*.
11. Zaitul, Z., Ilona, D., and Novianti, N. (2023). Good governance in rural local administration. *Administrative Sciences*, 13(1):19.
12. Angelia, N., Suryanto, S., & Wijaya, A. F. (2020). The role of village institutions in realizing participatory village governance. *Journal of Public Administration Studies*, 5(2), 85–94.
13. Purnomo, E. P., Ramdani, R., & Agustiyara. (2020). Digital governance in Indonesian village government: Challenges and opportunities. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(12), 1107–1116.
14. Zeho, F. H., Prabowo, H., Estiningtyas, R. A., Mahadiansar, M., & Sentanu, I. G. E. P. S. (2020). Stakeholder collaboration to support accountability in village fund management. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 6(4), 154.
15. Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2011). The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues. *Hague Journal on the Rule of Law*, 3(2), 220–246.
16. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *OECD Public Governance Reviews: Strengthening Public Governance*. Paris: OECD Publishing.